

# Perjalanan Demokratisasi di Malaysia: Kronologi Singkat

Dori Efendi\*

---

## Abstract

Change of democracy in Asia carrying impact to democracation process especially in Malaysia. So far now Malaysia's administration has willingness to depensive otoritariant system in Malaysia. Eventhough civil movement to change is still and strog in order to develop democratic system.

**Keyword:** Democracy, Politic

Angin perubahan demokrasi di Asia membawa dampak terhadap perjalan demokrasi di Malaysia. Pada mulanya pemerintah Malaysia begitu kuat dalam mempertahankan rezim otoriter di Malaysia bahkan sampai saat ini, Namun, meskipun demikian perjuangan rakyat untuk berubah tetap ada dan menjadi kekuatan demi terciptanya negara yang demokratis

**Kata kunci :** Demokrasi, Politik

---

## PENDAHULUAN

Banyak kalangan ilmuwan politik menilai paska krisis keungan Asia 1997 membawa perubahan politik di Asia Tenggara. Runtuhnya kekuasaan Jenderal Soeharto di Indonesia dan berjalanya transisi demokrasi dipandang sebagai saat-saat penting dalam "gelombang demokratisasi" berturut-turut yang telah melanda dunia sejak tahun 1970-an. Mengapa dikatakan sebagai saat-saat penting? Sebab, ia menjadi instrumen transformasi politik terutama dalam melahirkan hak politik dan kebebasan sipil yang lebih nyata.

Tulisan ini menganalisis proses transisi menuju demokrasi di Malaysia dengan melihat kedinamikaan politik rezim yang tampak cukup fluktuatif. Berdasarkan kedinamikaan tersebut, penulis membuat argumentasi hipotetikal yang berfungsi sebagai panduan utama. Argumen hipotetikal yang dimaksud adalah kedinamikaan

politik di Malaysia tidak mengarah kepada berjalanya proses transisi demokrasi, sebab kebebasan politik di Malaysia berada di bawah kekuasaan rezim yang berkuasa sejak kemerdekaan Malaysia 1957. Melalui hepotetis tersebut tulisan ini dibagi ke dalam beberapa bagian pembahasan; pertama, membahas proses demokratisasi yang identik dengan reformasi politik dan sekaligus memaparkan permasalahan demokratisasi di negara berkembang; kedua, mengupas dinamika politik; dan ketiga, menganalisis perlawanan oposisi yang berimpak terhadap tsunami politik 2008.

## GELOMBANG DEMOKRATISASI: BAHASAN SINGKAT

Lima dekade dahulu dunia dikejutkan dengan lahirnya 'Bunga Revolusi' di Portugal 1974 yang telah meruntuhkan kediktatoran militer yang berkuasa hampir setengah abad. Transisi

---

\* PhD Kandidat dalam bidang Administrasi Publik di Fakultas Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang, Malaysia. Email yang dapat dihubungi: doriefendi@yahoo.com

demokrasi yang melanda menyisihkan balutan rezim komunis di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet, pakar teori demokrasi berpendapat bahwa dunia telah menyaksikan gelombang ketiga dan bahkan gelombang keempat demokratisasi (Huntington 1993; Doorenspleet 2006).

Di samping karya Samuel Huntington, ada sebuah karya klasik dalam ilmu sosial dan politik yang melihat hubungan sebab akibat antara kapitalis dan demokratisasi. Bagi banyak teori, berkembangnya demokrasi liberal secara progresif disebabkan kemunculan kelas menengah (*middle class*) sebagai identifikasi agen demokratisasi yang meletakkan korelasi ekonomi sebagai pendorong pendemokrasian (Lipset 1959, 1960). Pendapat ini senada dengan Lerner (1964) yang mengungkapkan bahwa kemakmuran ekonomi memungkinkan tumbuh dan berkembangnya angka literasi, kadar pendidikan tinggi dan kebebasan media yang secara langsung mendorong munculnya kelas menengah di dalam masyarakat. Mengutip pendapat Huntington (1996:66) "*a large and large porportion of siciety consists of business people, profesionals, shopkeepers, teacher, sipil servants, managers, technicians, clerical and sales workers*". Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi meyuburkan benih-benih demokrasi dengan menciptakan dan memperluas masyarakat sipil dan mendorong perluasan masyarakat menengah.

Bila merujuk kepada konsep modernisasi barat yang didominasi oleh ilmuwan politik Amerika, mengusulkan demokratisasi adalah program normatif untuk transformasi masyarakat dari keterbelakangan terutama masyarakat otoriter menjadi demokratis dan moderen (Almon & Powel 1966). Secara empiris sudut pandang ini dapat mengkorelasi antara pengembangan ekonomi dan pembangunan politik secara positif. Perkembangan tersebut dapat membuka hubungan ekonomi kapitalis yang akan memberi stimulasi kepada kemajuan ekonomi dan politik karena kapitalisme akan mendorong satu pertumbuhan elit lokal yang

menjadi kendaraan untuk modernisasi dan transformasi politik negara.

Namun, demokrasi tidak dapat berkembang—meskipun ekonomi maju tanpa adanya rasa saling percaya antar masyarakat. Warren (1999), berpendapat bahwa demokrasi di negara membangun memerlukan koordinasi dan aksi kolektif, yang ditumbuhkan oleh rasa saling percaya antara masyarakat sama ada diperingkat elit ataupun massa karena masyarakat di negara membangun masih mengekalkan klas-klas sosial dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan kajian Przeworski *et al.* (2000) yang mengangkat isu demokrasi dan pembangunan mereka mendapati pembangunan ekonomi di negara membangun tidak selamanya berkait rapat dengan tranformasi rezim; seperti Singapura dan Malaysia—negara di Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi hingga kini belum melakukan perubahan sistem politik. Disi lain, terdapat juga negara yang pertumbuhan ekonominya rendah berjaya melaksanakan transformasi politik seperti Indonesia (1998).

Di Asia gelombang demokratisasi merupakan saat penting transformasi politik—adalah penggulingan rezim Marcos di Filipina pada tahun 1985, yang diikuti dengan berakhirnya pemerintahan otokratik Jenderal Chun Doo-Hwan di Korea Selatan 1992, dan pada tahun 1998 berakhirnya 32 tahun kekuasaan Jenderal Soeharto di Indonesia. Gelombang demokratisasi tersebut tidak terelakkan dalam tuntutan perebuan, bahkan pada tahun 2010-2011 gelombang tersebut muncul kembali di Tunisia dan Mesir yang menjadi gelombang demokratisasi keempat.

Di Tunisia dan Mesir, faktor ekonomi tidak menjadi alasan utama lahirnya gelombang demokratisasi. Namun, kebebasan berdemokrasi menjadi alasan rakyat menentang rezim yang berkuasa. Awal munculnya gerakan demokrasi tersebut dikarenakan oleh seorang Mohammed Bouazizi dari Sidi Bouzid, anak buruh tani, yang berdagang buah dan sayuran sebagai satu-satunya cara untuk menafkahi keluarganya. Gara-

gara tidak memiliki izin, bolak-balik barang dagangannya disita aparat kota Sidi Bouzid. Berulang kali pula dia membela diri dan mengupayakan untuk mendapatkan izin dan pengembalian barang yang disita. Tapi ijin tidak dikeluarkan, justru dilecehkan dan dikejar-kejar aparat. Pada 17 Desember 2010, dia membakar dirinya di depan kantor Gubernur. Bouazizi lantas menjadi sosok yang dilukiskan oleh filosof Sidney Hook sebagai “*eventful leader*,” di mana kisah tragisnya, kemudian, diikuti oleh Houcine Neji yang bunuh diri melompat ke tiang pemancang listrik tegangan tinggi dan Lotsi Guadri yang bunuh diri dengan menenggelamkan diri ke dalam sumur. Setelah itu, dalam kurun waktu 10 hari, tiga anak muda Tunisia lainnya, mencoba bunuh diri, karena frustrasi oleh kesulitan hidup di negara di mana lowongan pekerjaan profesional sangat langka.

### **POLITIK MALAYSIA: BERBAGAI AKTA YANG MENGEKANG**

Momentum 1997, melahirkan teriakan reformasi di Malaysia—tetapi tidak mampu menghasilkan transisi demokrasi. Di Kuala Lumpur pada tahun 1998, para demonstran turun kejalan melakukan demonstrasi, memprotes Perdana Menteri, Mahathir dan Mendukung Wakil Perdana Menteri, Anwar Ibrahim<sup>1</sup> untuk melaksanakan agenda reformasi. Namun, suara reformasi yang diteriakkan rakyat sampai saat ini tidak terlaksana. Bagaimana menerangkan

<sup>1</sup> Anwar Ibrahim adalah Wakil Perdana Menteri Malaysia sejak tahun 1993-1998. Disamping itu, Anwar Ibrahim juga memegang jabatan Menteri Keuangan Negara sejak tahun 1990-1998 dan Wakil Presiden Partai UMNO yang Presiden Paratainya adalah Mahathir Mohamad. Pada masa krisis keuangan Asia 1997, Anwar Ibrahim dianggap gagal oleh Mahathir dalam menyelesaikan kemelut ekonomi yang sedang berlaku di Malaysia. Permasalahan tersebut semakin meruncingkan pergolakan politik Anwar Ibrahim, beliau dituduh melakukan korupsi, dan homoseksual akibatnya Anwar Ibrahim dipecat dari semua jabatan pemerintah. Pada tahun 1999, Anwar Ibrahim dijobloskan kepenjara selama enam tahun di bawah Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri (*Internal Security Act*)

kegagalan rakyat tersebut? Saat Mahathir memegang tampuk kepemimpinan kekuasaan berpusat atas keputusannya dengan menggunakan undang-undang sebagai alat untuk menekan masyarakat dan musuh politik. Pemusatan kekuasaan tersebut bertujuan untuk mengamankan posisinya sebagai Perdana Menteri dan koleganya di dalam partai Union Malaysian National Organization (UMNO). Bahkan, pemusatan kekuasaan yang dilakukan Mahathir melemahkan kekuasaan monarki raja-raja yang termaktum dalam undang-undang Malaysia No. 16; Raja adalah kepala negara dan Perdana Menteri adalah ketua pemerintahan. Sikap tegas dan keras yang ditonjolkan oleh Mahathir merupakan cara memerintah negara Malaysia yang pluralis. Dengan menggunakan logika *domain of power*, rezim Mahathir menciptakan satu hubungan ketergantungan. Tujuannya agar semua perkara dapat terkoordinasi di bawah kendali rezim. Kekuasaan seperti ini menutup ruang demokrasi dalam negara Malaysia yang memberikan keuntungan kepada kelompok elit politik semata. Sebaliknya, dalam negara yang pluralis undang-undang yang menekan diperlukan untuk pembahagian kekuasaan antar etnik dan menjadi pilihan terbaik dalam dinamika politik Malaysia.<sup>2</sup>

Undang-undang keselamatan dalam negeri (*Internal Security Act*) contohnya, menjadi alat bagi Mahathir untuk menekan lawan politiknya yang berani mengkritik pemerintah. Anwar Ibrahim pada tahun 1998 yang menjadi tokoh reformasi dan bersebrangan dengan rezim berkuasa dijerumuskan kepenjara atas tuduhan Instabilitas politik dan sodomi. Meskipun, Anwar mendapat dukungan oleh rakyat untuk mereformasi sistem politik—namun, momentum tersebut tidak menghasilkan perubahan yang penting, bahkan Anwar kehilangan semua jabatan pemerintah dan jabatan politiknya.

Keberhasilan Mahathir Menahan Anwar di bawah undang-undang dalam negeri dapat

<sup>2</sup> Lihat, Jayum A. Jawan, *The Iban Factor in Sarawak Politik* (Serdang: UPM, 1993); Crouch, Harold, *Government and society in Malaysia* (Sydney: Allen And Unwin, 1996).

dikatakan sebagai keberhasilan rezim mengawal segala lini politik, yang mana pemerintah mampu menekan kelompok oposisi. Pada awalnya, disahkan undang-undang tersebut bertujuan untuk menghapus pemberontakan Komunis Malaya (1948-1960), undang-undang tersebut memungkinkan pihak berwenang untuk menangkap tanpa surat perintah setiap orang yang dicurigai bertindak dalam 'apapun yang merugikan keamanan negara menahan mereka tanpa pengadilan'. Sedangkan pembenaran aslinya adalah untuk memeriksa tekanan internal, dalam prakteknya undang-undang tersebut telah digunakan terhadap para pemimpin partai oposisi dan kelompok-kelompok kepentingan sosial.

Sikap pemerintah yang membatasi kebebasan rakyat dapat membawa rezim ke arah yang otoriter. Berbagai mekanisme digunakan untuk mengekalkan kekuasaan, media massa yang menjadi sumber informasi dibatasi ruang pemberitaannya. Mengikuti Hilley, Malaysia melakukan pembatasan yang penetratif ke atas informasi yang membenarkan pemerintah memanipulasi berita sebenar demi kepentingan rezim yang dapat mengekalkan *status quo*. Di sini, kekuasaan bermain semena-mena, setiap pemberitaan diharuskan mendapat izin dari pemerintah sesuai dengan undang-undang penyiaran (Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984). Sistem ini dapat mempolakan pemikiran rakyat, lebihnya lagi media-media yang ada di Malaysia dimiliki oleh pemerintah dan elit politik yang berpihak kepada rezim.

Menyedikan lagi, kaum intelektual dipaksa tunduk di bawah undang-undang universitas, yang tidak membenarkan mahasiswa ikut terlibat aktif dalam partisipasi politik. Walaupun, aspek-aspek otoriter politik Malaysia tampak jelas kekuasaan eksekutif resmi diperoleh melalui pemilihan umum. Ada universal hak pilih Rakyat dalam menentukan pilihan berdemokrasi dan memberikan hak hukum kepada pihak oposisi yang duduk di parlemen, membenarkan organisasi bukan kerajaan NGO berpartisipasi dalam pemerintah. Tetapi hakikatnya, semuanya adalah manipulasi elit penguasa dan segala alat-

alat pemerintah dimonopoli sepenuhnya yang dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan dalam setiap pemilihan umum.

## DARI PERLAWANAN HINGGA KE TSUNAMI POLITIK 2008

Jika dilihat dari teori transisi demokrasi di atas, Malaysia berdiri dari sesuatu lanskap pengecualian yang ganjil dalam sebuah rezim—meskipun memiliki kemajuan ekonomi yang mengagumkan, rezim politik yang berkuasa tetap kekal memerintah dan tahan terhadap perubahan. Secara ekonomi Malaysia telah mengalami gelombang kedua 'macam' Asian, sejak tahun 1971 hingga 2007 pertumbuhan ekonomi Malaysia masih pada purata 7-persen per tahun (Loh Kok Wah & Khoo Boo Teik, 2002). Jika dilihat melalui teori pembangunan demokrasi semestinya faktor kemajuan ekonomi telah mematahkan dominasi rezim yang berkuasa. Sebaliknya, pada tahun 1980-1990-an kemajuan ekonomi Malaysia dapat dikatakan sebagai ledakan boom ekonomi yang membawa pada perubahan dan kesejahteraan—malah kemajuan ekonomi tersebut menjadi faktor negara Malaysia menafikan demokrasi (Ariel Heryanto & Sumit K. Madal 2003).

Namun, keberpihakan ini pula yang memunculkan penentangan dari rakyat yang diwakili oleh gerakan sipil Non Government Organizations (NGOs). Sekilas di Malaysia masyarakat sipil sepertinya tidak memiliki peran dalam memajukan negara, Varshney (2002:46) mengartikan masyarakat sipil sebagai: "... *a host of informal group activities and meeting place that connect individuals, build trust, encourage reciprocity, and facilitate exchange of views on matters of public concern.*" Oleh itu, masyarakat sipil merupakan syarat bagi kehidupan politik moderen yang mencerminkan berfungsinya sebuah sistem politik demokratik.

Meskipun masyarakat sipil samar kemunculannya di Malaysia ianya menurut Philip (2003) rezim otoriter yang menekan dan menguasai undang-undang melalui konsensus telah menyalahgunakan kekuasaan dengan

berlakunya korupsi ditubuh elit. Ini menurut Philip merupakan embrio awal memunculnya tokoh organisasi masyarakat sipil progresif di Malaysia. Pada tahun 1969, Consumers' Association of Penang (CAP) dapat dikatakan sebagai NGO pertama di Malaysia yang dipimpin oleh S.M. Idris. CPA tersebut didirikan di Pulau Pinang yang merupakan wilayah regional ekonomi Malaysia dan memiliki hubungan luas dengan NGO Internasional yang bergerak dibidang sama seperti *Consumers International* yang bermarkas di Amsterdam. Bahkan semakin berkembangnya CPA, S.M. Idris mendirikan satu lagi NGO Sahabat Alam Malaysia (SAM). Dan pada periode 1990 NGO semakin berkembang di Malaysia seperti Tenaganita yang bergerak pada bidang hak-hak perempuan, hak asasi manusia (HAKKAM), politik reformasi (HANYA), dan Hak Hindu (HINDRAF) dan banyak lagi.

Berkembangnya NGO memberi dampak kepada keberanian media untuk menerbitkan berita kritis yang mengkritik pemerintah seperti *Utusan Consumer* mencetak 80,000 koran dalam bahasa Ingeris, Cina, Melayu, dan Tamil. Lima tahun kebelakang terjadi ledakan aktivis internet dan blogging di Malaysia yang aktornya adalah aktivis dari hak asasi manusia iaitu Raja Petra Kamarudin. Di sini, dapat dilihat pemetaan perkemabangan masyarakat sipil di Malaysia dalam berbagai peristiwa dan kerjasama antar komunitas semakin merencanakan dinamika kepolitikan. Bahkan penangkapan Anwar Ibrahim menjadi bahagian sejarah politik di Malaysia karena melalui penangkapan tersebut muncul oposisi kuat yang mengabungkan semua elemen masyarakat berbilang etnik ke dalam satu naungan partai politik iaitu Partai Keadilan Rakyat.

Kemunculan Partai Keadilan Rakyat dalam pergolakan politik menjadi alternatif terkontruksinya kepolitikan oposisi. Menariknya, Partai Keadilan Rakyat merupakan satu penggabungan dari beberapa organisasi yang pro terhadap demokrasi. Gerakan untuk keadilan sosial (ADIL) yang diilhami paradigma perjuangan, menjadi organisasi payung bagi organisasi yang lainnya. Melalui ADIL kampanye

tentang reformasi politik, ekonomi, dan sosial semakin gencar disuarakan, agenda yang ditawarkan oleh ADIL disambut riang gembira oleh para aktivis yang memiliki perbedaan latar belakang politik, kelas, dan etnik. Keberhasilan ADIL menarik para aktivis akhirnya terkontruksi satu wadah partai iaitu Partai Keadilan. Tidak lama ditubuhkan Partai Keadilan pada bulan April 1999, Wan Azizah Wan Ismail melakukan konsolidasi dengan pucuk pimpinan Partai Rakyat Malaysia yang melahirkan kesepakatan penggabungan dua partai dengan nama Partai Keadilan Rakyat. Dan menarik jajaran pimpinan NGO terkemuka seperti Iren Fernandez (Tenaganita), Tien Chua (Gagasan) dan Chandra Muzaffar (Singkat) ke dalam jajaran pengurusan.

Bergabungnya beberapa pimpinan NGO kedalam Parti Keadilan Rakyat (PKR) merupakan bentuk protes terhadap penzoliman hak asasi (Anwar Ibrahim). Chanra Muzaffar mengemukakan alasannya bergabung dengan PKR karena kasus Anwar dibuat atas rekayasa politik, peran NGO tidak cukup untuk mengontrol negara yang semakin semena-mena menggunakan kekuasaan dan telah menghancurkan lembaga penting seperti pengadilan. Apa yang diupayakan oleh Chandra Muzaffar membangkitkan kesadaran politik masyarakat Malaysia yang muncul kepermukaan pada tahun 2008.

Momentum pemilihan umum ke dua belas 2008 merupakan titik perlawanan kebangkitan rakyat. Dipicu oleh kelompok HINDRAF (gabungan dari semua NGO Hindu Malaysia), menentang pengucilan terhadap kebebasan beragama, semangat saling menghargai antar agama menjadikan masyarakat menyatu sebagai satu kesatuan bangsa yang mengkritik kebijakan pemerintah. Sudah semestinya, proses demokrasi dapat berjalan di dalam sesebuah negara ketika lahirnya kesadaran politik masyarakat dengan terlibatnya NGO sebagai penggerak kesadaran politik yang dimaknai sebagai *soft intervention* (Leo Agustino 2010).

Menyatunya rakyat sipil di Malaysia dapat difahami sebagai penyebaran idea demokrasi.

Indonesia contohnya, melalui penyatuan gerakan mahasiswa, NGO dan masyarakat sipil, idea demokrasi menyebar luas keseluruh lapisan masyarakat dan menolak gagasan politik yang ditawarkan oleh rezim berkuasa. Dapat dikatakan penyatuan masyarakat sipil merupakan bentuk daripada pemantapan idea sebuah generasi baru dalam membentuk identitas kolektifnya. Penyebaran idea ini pada gilirannya merefleksi apa yang disebut Eyerman & Jamison (1999) sebagai kepentingan pengetahuan generasi tertentu untuk masa mendatang. Dalam arti lain, pengetahuan generasi tertentu ini lah yang melahirkan perjuangan dan gerakan untuk melakukan perubahan yang dilandasi oleh idea.

Walaupun bagaimanapun, Malaysia tidak mengalami liberalisasi politik yang signifikan, apa lagi transisi demokrasi. Pada tahun 1998, meski rakyat melakukan demonstrasi yang merupakan demonstrasi terbesar di Malaysia sejak awal kemerdekaan pada 1957, koalisi rakyat tidak dapat melakukan reformasi karena aktor utama dalam gerakan reformasi berhasil dipatahkan gerakannya oleh rezim berkuasa. Ini menunjukkan bahwa tsunami politik di Malaysia ketika pemilihan umum kedua belas 2008 sebagai proses penyebaran idea demokrasi. Meskipun, hasil pemilihan umum 2008 mengekalkan rezim yang berkuasa, tetapi terlalu dini untuk memprediksi apa dampak jangka panjang dari penyatuan masyarakat sipil tersebut.

**Tabel 1. Jumlah Kursi Legislatif Malaysia Pemilu, 1999–2008.**

Party	1999	2004	2008
<i>Barisan Nasional</i>	148	198	140
UMNO	72	109	79
MCA	28	31	15
MIC	7	9	3
MIC	45	20	82
<i>Oposisi</i>	5	1	31
PKR*	27	7	23
PAS	10	12	28
DAP	193	219	222
<b>Total seats</b>			

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilu Malaysia dan Abbott (2009)

Sepertinya di Malaysia memerlukan krisis legitimasi rezim berkuasa untuk melaksanakan demokrasi, Huntington (1968) kuasa otokratik yang kukuh diperolehi melalui konsensus atau musyawarah kesepakatan bersama dalam negara sehingga memunculkan stabilitas politik yang utuh. Kenyataan Huntington (1968) semakin

memperkuat kebenaran dalam kepolitikan rezim berkuasa di Malaysia. Meskipun pada tahun 1998 terjadi pergolakan politik antara Mahathir dan Anwar ianya tidak membawa perpecahan yang signifikan dalam tubuh UMNO yang merupakan partai orang-orang melayu. Disamping itu, elit politik dari kelas melayu yang

tergabung didalam UMNO tidak melakukan pemberontakan terhadap pucuk kepemimpinan karena partai UMNO adalah partai yang mengkonsolidasi masyarakat melayu—walaupun ada Partai Islam Semalaysia tetapi ianya membawa ideologi islam. Di balik pergolakan dua pucuk kepemimpinan politik, pemerintah berhasil menyelesaikan kemelut ekonomi 1997-1998 yang membalikkan kondisi politik dan mengembalikan legitimasi Mahathir (Sivamurugan Pandian 2005:341).

Pada tahun 1999, Wan Azizah Wan Ismail memimpin koalisi oposisi dalam pemilihan umum. Namun, keterlibatan Wan Azizah dalam politik tidak memberikan pengaruh yang signifikan, Partai Keadilan Rakyat yang menjadi partai oposisi pemerintah gagal mendapat mayoritas kursi dua-pertiga pada pemilihan umum 1999. Disamping itu, berbagai permasalahan muncul dalam tubuh internal oposisi yang mengakibatkan kekalahan mutlak dalam pemilihan umum 2004.<sup>3</sup> Menariknya momentum 2004 tersebut adalah saat-saat Anwar Ibrahim dibebaskan dari penjara—namun kebebasan Anwar tidak memberikan dampak yang berarti dalam pemilihan umum 2004.

Ini menimbulkan pertanyaan mengapa Anwar kehilangan aura politiknya? Meskipun Anwar dibebaskan 2004, hak-hak politiknya dibatasi oleh pemerintah, secara hukum Anwar Ibrahim dilarang memegang jabatan politik sampai pada tahun 2008. Akibatnya, barisan oposisi tidak dipegang pucuk kepimpinannya oleh Anwar sampai diadakan kembali pemilihan umum 2008. Kesabaran Anwar dalam politik pada akhirnya terjawab, pada tahun 2009 ia menjadi pemimpin oposisi reformasi dari Partai Islam Malaysia

<sup>3</sup> Pada pemilu 2004, partai oposisi hanya mendapatkan 20 kursi diparlemen. Sedangkan partai pemerintah yang diwakili oleh Barisan Nasional mendapat mayoritas kursi sebanyak 198 kursi diparlement. Dari jumlah kursi keseluruhan 218, Partai Oposisi sekali lagi mengalami kegagalan dalam pemilu yang menyebabkan mereka tidak dapat mengambil alih kekuasaan dua-pertiga dari mayoritas. Bahkan Partai Keadilan Rakyat yang mewakili Anwar di bawah kepemimpinan istrinya hanya mendapatkan satu kursi sahaja.

(PAS) yang mewakili suara dari rakyat muslim Malaysia khususnya provinsi Kelantan, Partai Aksi Demokratik (Democratic Action Party, DAP) mewakili suara dari kaum Cina Malaysia dan Partai Anwar, KeAdilan.

Namun, pemilihan umum kedua belas 2008, dalam slogan katanya 'Menawan Putra Jaya' barisan oposisi menemui kegagalan merebut mayoritas suara diparlemen. Disamping itu, kegagalan partai oposisi mengejutkan para akademisi karena disebalik kegagalan partai oposisi ianya dianggap sebagai kemenangan bagi partai oposisi. Mengapa demikian? Kekalahan yang diartikan kemenangan tersebut dikarenakan partai oposisi berhasil menawan lima negara bagian dari dua belas provinsi di Malaysia. Lima negara bagian ini dinilai cukup berpengaruh dalam ekonomi Malaysia, Kuala Lumpur (Negeri Persekutuan) merupakan Ibu Kota Malaysia, Selangor, mengililingi pusat kota Malaysia, Pulau Pinang, (tempat mayoritas kaum Cina dan sebagai arus perdagangan ekonomi), begitu juga dengan negara bagian Kelantan dan Kedah. Meskipun, Barisan Nasional (BN) menguasai mayoritas suara di parlemen ianya ditafsirkan sebagai kekalahan simbolis untuk barisan yang menggugah kepemimpinan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi.

Keberhasilan partai oposisi menawan lima negara bagian yang paling ekonomis membuka ruang politik Anwar untuk melakukan kampanye membujuk para wakil rakyat dari Partai Barisan Nasional untuk bergabung dengan partai koalisi. Apatah lagi kembalinya Anwar keparlimen pada 26 Agustus semakin memperkuat Anwar dan barisan oposisi untuk mempengaruhi anggota parlimen melakukan pembelotan. Namun, usaha dari barisan oposisi tidak menemui tujuannya karena kekuatan Barisan Nasional yang begitu lama menguasai pemerintahan sejak diproklamasinya kemerdekaan Malaysia 51 tahun yang lalu telah menancapkan kuku begitu dalam. Cengkraman tersebut seakan-akan menjauhkan Malaysia dari proses demokratisasi. Begitu juga dengan saat ini, spekulasi paskapemilihan umum 2008 akan adanya pembelotan dua puluh satu orang wakil rakyat

dari partai UMNO dan menjatuhkan rezim berkuasa dengan menguasai dua pertiga kursi parlemen tidak terealisasi. Konflik antara Mahatir dan Anwar tidak menggoyahkan hegemoni partai UMNO yang sampai saat ini memegang tampuk kekuasaan.

## PENUTUP

Artikel ini telah membahas bagaimana momentum demokratisasi 1997 di Asia tidak memiliki dampak terhadap sistem politik Malaysia. Rezim yang berkuasa kekal memerintah dengan menguatnya *status quo* yang didapati melalui pengeksploitasian undang-undang yang menekan kebebasan rakyat. Kelebihan yang dimiliki melalui undang-undang tersebut menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap rezim. Walaupun, dalam proses reformasi rakyat menentang kekuasaan rezim, namun tokoh reformasi yang mewakili suara masyarakat berhasil dikalahkan oleh rezim berkuasa. Malangnya, mahasiswa yang merupakan tokoh intelektual dilarang aktif dalam setiap agenda politik dan semua media informasi disekat oleh pihak berwenang atas alasan stabilitas negara. Padahal, media-media tersebut digunakan untuk memanipulasi berita, apatah lagi media tersebut dimiliki oleh elit pemerintah yang tergabung dalam partai UMNO.

Walaupun, kekuasaan rezim tetap kekal sampai saat ini ianya tidak menyurutkan perlawanan rakyat. Melalui partai oposisi, rakyat menuntut reformasi rezim berkuasa. Dan gerakan non-pemerintah terlihat aktif melibatkan diri di dalam partai oposisi. Pada hakikatnya, rakyat Malaysia mengharapkan sistem demokrasi, ini terbukti ketika pemilihan umum 2008 yang menghasilkan tsunami politik, partai oposisi berhasil menawan lima provinsi yang penting dalam sektor ekonomi. Meskipun, perlawanan rakyat tampak samar, namun proses demokrasi telah berjalan baik melalui media alternatif seperti internet maupun melalui perwakilan partai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, J. P, 2009, Malaysia's transitional moment? Democratic transition theory and the problem of Malaysian exceptionalism, *South East Asia Research* 17(2): 175-199.
- Almond, G. & Powell, G.B, 1966, *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Boston: Little, Brown and Co.
- Ariel, Heryanto & Sumit, K. Mandal, 2003, *Challenging Authoritarianism In South-east Asia: Comparing Indonesia And Malaysia*, 1-23, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Case, William, 1993, Malaysia: The Semi-democratic Paradigma, *Asian Studies Review* 17: 75-82.
- Crouch, H, 1996, *Government and society in Malaysia*, Sydney: Allen And Unwin.
- Dahl, R. A, 1998, *On Democracy*, New Haven: Yale University Press.
- Doorenspleet, R, 2006, *Democratic transition: Exploring the structural source of the fourth wave*, Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Embong, A. R, 2001, *Southeast Asian Middle Classes: Prospects for Social Change and Democratisation*, Bangi: Penerbit UKM.
- Eyermen, R. & Jamison, A, 1999, *Social movement: a cognitive approach*, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press.
- Huntington, S. P, 1993, *The Third Wave: Democratisation in the Late Twentieth Century*, Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- Huntington, S. P, 1996, 'Democracy for the long haul', *Journal of Democracy* 7(April).
- Koo, B. T, 1995, *Paradoxes of Mahathirism: An Intellectual Biography of Mahathir Mohamad*, Singapore: Oxford University Press.
- Jayum A. Jawan, 1993, *The Iban Factor in Sarawak Politik*, Serdang: UPM.
- Jesudason, J, 1995, 'Statist democracy and the limits to civil society in Malaysia', *Journal*



- of Commonwealth and Comparative Politics* 33(3): 335-356.
- Leo, Agustino, 2010, *Pendemokrasian di Indonesia: Daripada Orde Baru Kepada Orde Reformasi*, Tesis Phd. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Lipset, S, 1959, 'Some social requisites of democracy: economic development and political legitimacy', *American Political Science Review* 53.
- Lipset, S, 1960, *Political Man*. Garden City, NY.: Anchor Books.
- Loh Kok Wah, F. and Khoo Boo Tiek, eds 2002, *Democracy in Malaysia: Discourses and Practices*. Richmond: Curzon.
- Lerner, D, 1964, *The passing of traditional societies*, New York: Free Press.
- Milne, R. Stephen &. Mauzy, Diane K, 1999, *Malaysian politics under Mahathir*. London: Routledge
- Philip, F. Kelly, 2003, *Developing dissent in industrializing Localities: Civil society in Penang and Batam*. Dlm. Ariel, Heryanto & Sumit, K. Mandal (pnyt) *Challenging Authoritarianism In Southeast Asia: Comparing Indonesia And Malaysia*, hlm. 61-89, London And New York: RoudledgeCurzon.
- Varshney, A, 2002, *Ethnic conflict and civic life*, New Haven: Yale University Press.
- Warren, M.E, 1999, Introduction. Dlm. Mark E. Warren (pnyt). *Democracy and trust*, hlm. 1-18, Cambridge: Cambridge University Press.
- Weiss, M, 2006, *Protest and Possibilities: Civil Society and Coalitions for Political Change in Malaysia*, Stanford, CA.: Stanford University Press.